

**INTERVENSI SOSIAL PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
MEMBANGUN
INOVASI PERDESAAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

***SOCIAL INTERVENTIONS OF REGIONAL GOVERNMENTS IN
BUILDING RURAL INNOVATION IN HULU SUNGAI SELATAN
REGENCY, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE***

¹Adi Suhendra, ²Imam Radianto Anwar Setia Putra

^{1,2}Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, Indonesia

e-mail: adisuhendra.pm@gmail.com

Diserahkan: 01/11/2019, Diperbaiki : 06/12/2019 , Disetujui : 10/12/2019

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan pemerintahan daerah. Paradigma lama pelayanan di daerah, aparatur masih memposisikan diri bukan sebagai pelayan publik tetapi seseorang yang harus dilayani. Paradigma baru menyebabkan masyarakat menuntut pelayanan di daerah dapat dilakukan secara inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa dengan melakukan intervensi kebijakan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Peneliti melakukan observasi terlibat (*participant observation*), dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, gambar dan arsip. Sedangkan pengolahan data dianalisis dengan melakukan reduksi data. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa intervensi sosial untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa. Intervensi sosial dalam konteks ini adalah masyarakat desa diarahkan pada penciptaan inovasi dalam menciptakan budidaya ikan sungai dan wisata Balanting Paring. Upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas mencakup pada perubahan dengan menggunakan kebijakan inovatif dan dukungan dari inovasi teknologi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu mengawasi sungai dari gangguan *illegal fishing* dan penciptaan inovasi teknologi Si Pandu Wisata yang menawarkan konsep mengubah sitem pelayanan pariwisata menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dan lebih cepat.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Inovasi Perdesaan, Intervensi Sosial, Inovasi Teknologi, Inovasi Kebijakan

Abstract

This research is motivated by the existence of a new paradigm in local government services. The old paradigm, service in the area, the Apparatus still positions itself not as a public servant but someone who has to wait. The new paradigm encourages the citizen to demand innovative public services to be implemented. This research aims to increase community empowerment in villages by policy and technology intervention. This study uses a qualitative method. Data collection is done by using data triangulation. Researchers involved observations (participation observation), by conducting interviews and collecting data in the form of written documents, images and archives. While processing data is done by data reduction process. The results

obtained in this study are the District Government of Hulu Sungai Selatan conducted several social interventions to increase community empowerment at the village level. Social intervention in this context is the village community directed at the renewal of river fish farming and Balanting Paring tourism (bamboo rafting tourism). The effort to change the planning process towards individuals, groups, or communities that approve the change by using innovative policies and support from technological innovation. Hulu Sungai Selatan Regency makes the Regulation No. 17/2005 concerning Protection of Fish Resources and Prohibition of Fishing with Stun and Putas Devices and to form a Community Monitoring Group (Pokmas) to help increase the river flow from illegal fishing and support the search technology of Pandu to make tourism services more organized, easier and faster.

Keywords: Local Government, Rural Innovation, Social Intervention, Technology Innovation, Policy Innovation

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa data jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau mengalami peningkatan dari September 2016 yang hanya 27,76 juta. Selama periode September 2016 – Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang dari 10,49 juta pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017. Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang dari 17,28 juta pada September 2016 menjadi 17,10 juta pada Maret 2017 (Tempo.co 2017).

Namun demikian, dari data yang sama kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kota dan desa masih juga dikatakan timpang. Tercatat dari data yang di rilis oleh BPS (2017) jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk di perkotaan, tercatat sebanyak 13,47% kemiskinan yang berada di desa dan sebanyak 7,26% kemiskinan di wilayah perkotaan. Hal ini yang mendorong arus urbanisasi terus terjadi. Jika dibiarkan, ada kekhawatiran desa akan ditinggalkan oleh penduduknya. Pada akhirnya Desa tidak lagi mandiri dan terus bergantung pada perkotaan.

Dampak dari tekanan tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya mulai melakukan intervensi melalui reformasi pemerintahannya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Undang-undang tersebut memberi kerangka dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan pengaturan terhadap Pemda di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, maka penataan organisasi terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah menjadi suatu yang tak bisa dihindari untuk merubah paradigma lama yang sentralistik menuju ke arah yang lebih desentralistik (Undang-Undang Nomor 23, 2014).

Apalagi sejak adanya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Menurut Peraturan ini, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam pembangunan daerah, bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017).

Selaras dengan tujuan diatas, desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya

berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan adanya inovasi daerah, pemerintahan daerah dapat membuat inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat terlebih dalam pembuatan inovasi sosial. Dalam konteks itu, penelitian ini berusaha menggambarkan berbagai upaya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Penelitian ini berusaha memotret bagaimana upaya pemerintah daerah dalam usahanya menciptakan inovasi daerah di kawasan perdesaan. Dalam batasan penelitian ini, yang dimaksud kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Provinsi Kalimantan Selatan, daerah ini memiliki keterkaitan dalam membangun inovasi perdesaan walaupun nama dan jenis inovasinya masing-masing memiliki perbedaan. Kabupaten ini membuat investasi penting di wilayah perdesaan. Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Untuk merangsang investasi dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Investasi diarahkan ke desa guna menciptakan pemberdayaan di desa.

Seperti halnya inovasi unggulan Inovasi Telat Berkemas (Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat), inovasi ini telah mendapatkan apresiasi pemerintah pusat berupa penghargaan Top 40 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Program Tetap Berdayakan Kelompok Masyarakat atau Telat Berkemas, adalah bentuk kemitraan Dinas Perikanan Pemerintah

Kabupaten HSS bersama masyarakat dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan secara melawan hukum (*illegal fishing*). Selain itu inovasi yang lainya adalah SI PANDU WISATA (Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata). Pelayanan terpadu tersebut melibatkan berbagai pelaku usaha pariwisata yang ada di kawasan Loksado seperti pemberi jasa joki bamboo rafting, jasa ojek kawasan, pengelola penginapan atau *homestay*, dan jasa pemandu wisata atau *tour guide* dan kemudian dibentuk "*Pawadahan*". Pembentukan pengurus persatuan pelaku usaha pariwisata yang dipandu oleh peran serta pemerintahan daerah

Berdasarkan penelitian terdahulu, sudah cukup banyak penelitian yang pernah mengulas mengenai intervensi dengan melakukan inovasi, utamanya penelitian yang dilakukan oleh negara-negara maju. Adapun penelitian lainnya, menekankan pada aspek lain seperti pertimbangan politik dan sosial. Seperti yang ditulis oleh Rogers (1995) dalam bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Rogers menjelaskan mengenai inovasi perebusan air di Desa Peru. Penelitian menjelaskan mengenai kegagalan dinas kesehatan dalam menerapkan inovasi itu. Dinas kesehatan masyarakat di Peru mencoba mengenalkan inovasi ke penduduk desa untuk memperbaiki kesehatan mereka dan memperpanjang hidup mereka. Agen perubahan ini menyarankan agar masyarakat merebus air mereka sebelum diminum. Inovasi ini gagal karena dinas kesehatan mereka tidak memperhatikan budaya setempat.

Penelitian lainya yang dilakukan oleh Kloczko-Gajewska (2014) menjelaskan mengenai inovasi di perdesaan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Penelitian ini mencoba jawab pertanyaan apakah itu tematik desa, dimana masyarakat bersama memutuskan topik dan mempersiapkan inovasi yang unik tempat wisata terutama berbasis di daerah warisan budaya, alam, dan sosial. Sedangkan Freeman (2017)

menceritakan penelitiannya yang dilakukan di Desa Mozambik- Afrika Selatan. Penelitian ini mencoba menyertakan Informasi dan Teknologi (IT) dalam bidang pertanian dengan menggunakan aplikasi di *handphone*, petani dapat memantau pertumbuhan dan vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian di negara maju dalam menelaah inovasi di wilayah perdesaan, para peneliti lokal di Indonesia juga melakukan penelitian inovasi perdesaan dengan menekankan berbagai sudut pandang. Pingkan & Hamzens (2007) membahas mengenai inovasi sosial yang dilakukan oleh para nelayan. Strategi ini disebut sebagai strategi inovasi sosial pengembangan mutu SDM nelayan secara komprehensif, atau dapat disingkat dengan strategi inovasi sosial pengembangan mutu SDM nelayan. Sementara Sofianto (2013) mencoba mengulas mengenai persoalan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini memfokuskan pada analisis kebutuhan penguatan dan peningkatan peran Pokdarwis di Desa Karangrejo untuk meningkatkan pengelolaan wisata mereka. Inovasi sosial berusaha mengembangkan daerah desa-desa di perdesaan mampu dijadikan wisata nasional.

Kendati demikian, para penelitian diatas menekankan pada unsur tertentu yakni seputar ekonomi dan politik dalam keterkaitan inovasi sosial. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di atas, penelitian ini berusaha menelaah inovasi sosial dari beberapa sudut pandang pemerintahan daerah. Penelitian ini juga dianggap penting dan relevan dalam melihat konteks kekinian di Indonesia. Konteks pembangunan kota cerdas dimaksudkan dalam rangka kewajiban negara menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga disebutkan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi

hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dan memiliki relevansi yang tepat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, sebagai kementerian yang membina dan mengawasi pemerintahan di daerah, Kemendagri memiliki kewenangan mensinergikan dan mengkoordinasikan program pemerintah pusat yang dikeluarkan ekmenterian/lembaga sektoral agar sukses dalam pelaksanaannya di daerah. Berdasarkan kebijakan di atas, pemerintah daerah melakukan berbagai pembenahan dan terobosan inovatif dalam melakukan reformasi pelayanan yang terkait dengan inovasi sosial.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan instrumen berupa wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi lapangan serta dianalisis dengan cara non statistik (Bryman 2012). Sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dimana peneliti akan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dari persoalan di Kabupaten HSS.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan inovasi desa. Pendekatan Kualitatif adalah sebuah pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk melakukan deskripsi subyek secara tajam, dan mendapatkan kedalaman informasi, serta kekayaan interpretasi (Rubin, Allen; Babbie 2011).

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Menurut Denzin (2012) triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Selain itu, dilakukan penggalian arsip, data investasi dan tanya jawab dengan informan. Sedangkan untuk pengolahan data, peneliti melakukan reduksi data. Seperti yang jelaskan Strauss & Corbin (1994), reduksi data dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian pada fokus kebutuhan penelitian, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi data dilakukan peneliti dari sepanjang proses penelitian ini.

Keberadaan peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dalam pengamat inovasi di pemerintahan daerah, menjadikan peneliti memahami dan mendengar langsung percakapan dan cerita Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berbicara dengan mereka, melakukan wawancara, membaca pemberitaan media lokal, serta memverifikasi data- data dan informasi pendahulu kepada stakeholder yang ada. Proses wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang berada di Dinas Pariwisata dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya *Illegal Fishing* dan Melesetnya Target Wisatawan

Ibukota sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten HSS terletak di Kandangan. HSS memiliki luas sekitar 1.703 km² dan berpenduduk sekitar 212.485 jiwa. Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran

rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa.

Secara umum, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten HSS pada tahun 2018 memperoleh skor IPM sebesar 68,41. Angka ini menggambarkan Kabupaten HSS berada pada IPM dengan kategori “Sedang”. Perhitungan secara skor IPM, Kabupaten HSS mengalami peningkatan nilai dari tahun ke tahun (2014-2018). Posisi IPM Kabupaten HSS berada pada peringkat ke 7 se-kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan (posisi peringkat sama dengan tahun 2017), meskipun IPM Kabupaten HSS masih dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar (70,17).

Kabupaten HSS yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang memiliki kawasan perairan rawa dan sungai yang termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Amandit dan Sub DAS Nagara. Kondisi wilayah ini memiliki keunikan dan karakteristik yang beragam. Potensi perairan umum yang dimiliki Kabupaten HSS adalah sebesar 80.790 Ha (44,76%) meliputi perairan rawa 60.697 Ha dan perairan sungai 20.093 Ha dari jumlah luasan wilayah Kabupaten HSS 180.494 Ha. Dengan kawasan reservat Danau Bangkiau seluas 615 Ha.

Kabupaten HSS mencanangkan untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk itu Kabupaten HSS mencoba untuk memperbaiki kondisi sungai sebagai potensi sumber daya perikanan dan peningkatan wisatawan pada sektor swasta.

Jika dilihat dari potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki perairan umum Kabupaten HSS sangat kaya dan tergolong alamiah. Berdasarkan data statistik tahun 2015 tercatat 1.879 jumlah rumah tangga perikanan tangkap dari jumlah penduduk Kabupaten HSS 227.153 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan dan nelayan musiman yang

menggantungkan diri dari menangkap ikan di perairan umum. Dengan produksi perikanan tangkap HSS tahun 2007 sebanyak 6.921,3 ton, sementara produksi perikanan di perairan umum Kalimantan Selatan sebesar 53.563 ton dan 294.700 ton se-Indonesia. Kondisi kealamiah perairan umum harus tetap dijaga agar produktivitas perairannya seperti kelimpahan ikan tetap tinggi. Dalam kondisi yang normal mereka mampu menghasilkan tangkapan bermacam-macam jenis ikan dan ukuran minimal 3–5 kg/hari, sedangkan di musim kemarau mereka mampu menangkap ikan 10–20 kg/hari.

Namun demikian, maraknya kegiatan *illegal fishing* di Kabupaten HSS sering terjadi. Secara ekonomi *illegal fishing* menguntungkan pelaku dengan perolehan hasil sebanyak 25-50 kg/hari. Namun kegiatan ini dalam jangka panjang akan berdampak negatif terhadap ekologi perairan dan ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas *illegal fishing* tidak hanya melemahkan gerak sasaran ikan, mematikan ikan-ikan kecil tetapi juga menyebabkan ikan-ikan menjadi infertil, serta menimbulkan pencemaran perairan karena bangkai ikan-ikan yang tidak bernilai komersial langsung di buang ke perairan. Faktor inilah yang menyebabkan produk perikanan tangkap menurun.

Di sektor lain, misalnya pariwisata, Kabupaten HSS juga mengalami kendala. Padahal potensi wisata di Kabupaten HSS sangat mungkin untuk dikembangkan. Karakteristik dataran dengan banyak sungai yang menjalar dan menghubungkan beberapa kabupaten. Setidaknya terdapat sungai besar Amandit yang bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito). Sungai Amandit mempunyai dua cabang sungai, yaitu Sungai Bangkan dan Sungai Kalumpang.

Secara historis, kegiatan masyarakat di Kabupaten HSS khususnya suku dayak zaman dahulu mempunyai aktivitas mengangkut bambu melewati sungai untuk dijual ke kota.

Aktivitas tersebut turun menurun menjadikan sungai sebagai media transportasi air di Loksado. Hal ini kemudian menginspirasi masyarakat untuk mengembangkannya menjadi wisata arung jeram bambu.

Wisata Balanting Paring atau *Bamboo Rafting Loksado* merupakan salah satu wisata arung jeram yang terletak di Sungai Amandit. Pemandu wisata merakit beberapa batang bambu untuk dijadikan sebuah kapal. Kapal ini yang dijadikan alat untuk menyusuri sungai. Kualitas air sungai yang jernih, deras, serta sebaran bebatuan menjadikan wisata ini kian menantang wisatawan.

Pengembangan ekonomi wisata perdesaan, pemerintahan daerah menghadapi sejumlah masalah diantaranya adalah target kunjungan wisata yang ditetapkan Kabupaten HSS gagal tercapai. Dinas Pariwisata menjelaskan, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 hanya sebesar 6.490 orang dari target sebesar 8.650 orang yang ditetapkan. Beberapa kendala dalam sulitnya mencapai target, misalnya disebabkan oleh pelayanan wisata Balanting Paring hanya dapat dilakukan ketika wisatawan mengunjungi Loksado, tidak ada kejelasan jadwal, kurangnya sosialisasi wisata dan ketidakadaan transparansi tarif untuk merasakan wisata Balanting Paring, serta kesenjangan penghasilan antara penarik Balanting Paring yang dirasakan masyarakat.

Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Intervensi

Kajian ini melihat beberapa intervensi pemerintahan daerah untuk merubah masalah yang ada di tingkat lokal. Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan untuk kembali meningkatkan kesejahteraan sosial (Zastrow 2017). Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas (Adi 2005). Dikatakan 'perubahan terencana' agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya.

Perubahan sosial terencana di tingkat makro yang lebih luas (*high level macro intervention*), atau sering disebut dengan perubahan sosial di tingkat makro. Disini perubahan diarahkan pada upaya merubah masyarakat secara lebih luas, yaitu dilakukan melalui kebijakan sosial maupun perundang-undangan (Payne 2014).

Pemerintah daerah menginisiasi pembuatan kebijakan untuk memberantas kasus *Illegal fishing*. Berlakunya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas atau Sejenisnya, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu mengawasi sungai dari gangguan illegal fishing.

Berdasarkan data pada Dinas Perikanan jumlah Pokmaswas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebelum tahun 2005, jumlah Pokmaswas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2004 sebanyak 11 kelompok dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 22 kelompok. Namun demikian, Seiring meningkatnya jumlah Pokmaswas, data pelaku *illegal fishing* juga mengalami peningkatan. Kurun waktu tahun 2003-2009 jumlah kasus yang mendapat kedudukan hukum tetap sebanyak 80 kasus. Hal ini menunjukkan belum adanya gerak langkah pengawasan yang terpadu.

Keterbatasan jumlah petugas pengawas dan luasnya perairan umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerlukan suatu kebijakan dan pengelolaan yang terkoordinir antara masyarakat di sekitar wilayah perairan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pemegang kebijakan untuk menjadikan kelompok masyarakat sebagai bagian dari jaringan sistem pengawasan dan pengelolaan wilayah yang berbasis masyarakat. Pola pengawasan ini menggagas sebuah

program “TELAT BERKEMAS” Tetap Lestari Berdayakan Kelompok Masyarakat. Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Dan Penanganan Tindak Pidana di bidang perikanan yang mempunyai tugas menangani tindak pidana di bidang perikanan dan mengkoordinasikan kegiatan penanganan tindak pidana di bidang perikanan secara efektif, efisien dan memenuhi rasa keadilan.

Tim Koordinasi ini secara aktif bekerjasama dan memberdayakan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam kegiatan pengawasan dan razia *illegal fishing*. Tim ini juga memberikan pembinaan dan penyuluhan serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pemberdayaan pengawasan sumberdaya ikan dengan terbitnya himbauan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adanya Tim Koordinasi yang bekerjasama dengan Pokmaswas menyebabkan kerja Pokmaswas lebih terarah dan penanganan kasus illegal fishing lebih sistematis dan terpadu.

Pokmaswas pertama kali didirikan di Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, dan hingga sekarang sudah ada kurang lebih 24 kelompok Pokmaswas terbentuk di HSS. Dalam pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Perikanan kemitraan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat pengawas yang berjalan semakin baik menghasilkan beberapa keluaran, yaitu pertama dari aspek kebijakan, terbitnya Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 134 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Kedua, Pemberdayaan Pokmaswas dengan munculnya kesadaran masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional Pokmaswas, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan pengawasan sumberdaya

perikanan dan menyebarluaskan larangan *illegal fishing*. Ketiga, jumlah Pokmaswas sebagai mitra koordinasi dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan sebanyak 30 kelompok. Keempat, pembuatan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pemerintahan kabupaten tetangga tentang peningkatan kerjasama pembangunan masyarakat di daerah perbatasan. Karena perbatasan kabupaten merupakan wilayah perairan umum yang sama-sama digunakan oleh masyarakat dalam melakukan usaha penangkapan ikan.

Hingga saat ini keberhasilan inovasi kebijakan yang dilakukan setidaknya memberikan dampak pada pertumbuhan daya saing daerah. Pertama, Terjadinya penurunan *illegal fishing* pada periode tahun 2003-2009 sebanyak 80 kasus sementara periode 2010-2016 ditemukan 40 kasus. Kedua, Meningkatnya produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun. Tahun 2010 produksi perikanan tangkap sebesar 7.225,2 ton, tahun 2011 sebesar 7.350,35 ton, tahun 2012 sebesar 7200,5 ton tahun 2013 sebesar 7.313,69, tahun 2014 sebesar 7.501,20 ton dan tahun 2015 sebesar 7.964,64 ton serta tahun 2016 sebesar 8.225,4 ton dan ketiga, deteksi dini *illegal fishing* dapat dilakukan dengan cepat melalui pemantauan pada menara dan pos pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas serta patroli/razia yang terjadwal juga meningkatnya intensitas pengamanan.

Upaya Pemerintahan Daerah membangun Inovasi Digital Perdesaan

Bupati HSS *melaunching* program Si Pandu Wisata yang digagas Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata (Disporapar) HSS, bertempat di Graha Wisata Amandit, Kecamatan Loksado. Kepala Disporapar HSS menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata di Kabupaten HSS, dengan sistem pelayanan terpadu pariwisata berbasis Android. Program sistem

terpadu ini didasari karena melihat selama ini jasa pengelolaan usaha jasa pariwisata di Kecamatan Loksado masih dilakukan secara perseorangan atau individu saja.



Gambar 1. Aplikasi Android Sipandu Wisata

Sumber : Google Playstore

Melalui Si Pandu Wisata, Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata dikembangkan dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan tata kelola dan pemasaran pariwisata, di Kabupaten HSS jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 sebesar 6.490 orang dengan target sebesar 8.650 orang, tidak tercapainya target disebabkan oleh pemasaran pariwisata yang masih konvensional, informasi pariwisata disampaikan hanya melalui brosur, pamflet, layanan jasa wisata masih perseorangan dan tidak transparan.

Program Si Pandu Wisata ini menawarkan konsep mengubah sitem pelayanan pariwisata menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dan lebih cepat. Aplikasi ini diharapkan dapat berdampak pada pengelolaan pariwisata yang profesional. Fasilitas menu yang ditawarkan di aplikasi adalah jasa pariwisata, seperti di Desa Haratai Kecamatan Loksado, mulai dari penginapan, angkutan dan fasilitas seperti lanting bambu dan joki (pengemudi lanting bambu). Adanya sistem aplikasi android ini membuat masyarakat dapat memesan dengan mudah melalui *handphone* saja. Para wisatawan akan mudah untuk melakukan pemesanan dengan cepat, dan dapat mengetahui langsung tempat menginap, lanting yang digunakan beserta nama joki

yang akan membawanya saat *bamboo rafting* hanya dengan menggunakan *handphone*. Bupati HSS mengatakan sangat mengapresiasi peluncuran program ini, ke depan akan menjadi sektor yang mampu menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi HSS dan Kalimantan Selatan. Tujuannya tidak lain adalah agar wisata di Kabupaten HSS dapat menyediakan pelayanan yang baik, pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses tujuan wisata dan agar tamu atau wisatawan yang datang bisa betah di Loksado.

Si Pandu Wisata sebagai media digital menghubungkan destinasi wisata dengan wisatawan. Aplikasi ini merupakan pelayanan pariwisata yang terintegrasi dalam satu wadah aplikasi yang dikelola secara daring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Loksado. Pola terpadu ini dapat mencegah adanya monopoli, meningkatkan transparansi dan wisatawan dapat mengakses layanan jasa wisata dengan mudah. Hingga saat ini aplikasi ini telah dapat di download di *playstore*. Diterapkannya pola terpadu ini membuka ruang dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan pada tahun 2018 bisa terserap 201 orang tenaga kerja terdiri : joki bambo rafting sebanyak 89 orang, ojek kawasan 52 orang, *home stay/ resort* 15 buah (45 pekerja), pemandu wisata 15 orang, dibandingkan tahun 2016 pekerja penjual batang bambo 37 orang, oje angkutan hasil perkebunan 15 orang, *home stay/resort* 6 buah (18 pekerja), pemandu wisata 3 orang. Inovasi pelayanan publik di bidang pariwisata melalui Si Pandu Wisata, Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata dikembangkan dengan manfaat, yaitu pertama, mencegah adanya monopoli, meningkatkan transparansi dan memudahkan wisatawan untuk mengakses layanan jasa wisata dan kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pemerintahan daerah Kabupaten HSS melakukan beberapa intervensi sosial untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa. Intervensi sosial dalam konteks ini adalah masyarakat desa diarahkan pada penciptaan inovasi dalam menciptakan budidaya ikan sungai dan wisata Balanting Paring. Upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas mencakup pada perubahan dengan menggunakan kebijakan inovatif dan dukungan dari inovasi teknologi. Kabupaten HSS membuat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum dan Putas Atau Sejenisnya, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu mengawasi sungai dari gangguan *illegal fishing* dan penciptaan inovasi teknologi Si Pandu Wisata yang menawarkan konsep mengubah sistem pelayanan pariwisata menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dan lebih cepat.

Rekomendasi

Dari hasil kajian ini diharapkan ke depan, ada kelembagaan yang mengevaluasi hasil keseluruhan inovasi dari masalah yang diselesaikan. Kelembagaan merupakan sekumpulan aturan main dan tata cara yang berperan dalam pengaturan dan pengalokasian sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Kelembagaan tercipta dengan adanya dukungan regulasi tentang inovasi daerah. Kelembagaan harus dibuat dalam kelembagaan pemerintahan dan sosial. Kelembagaan ini diinisiasi untuk memantau keberlanjutan inovasi yang telah berjalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten HSS dan Asori Peneliti BPP Kemendagri yang telah banyak memberikan masukan demi kebaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Lmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian Dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- BPS. 2017. "Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan, 1970-2017." *BPS Indonesia*. <https://www.bps.go.id/statistictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. Fourth Edi. New York: Oxford University Press.
- Denzin, N. K. 2012. "Triangulation 2.0." *Journal of Mixed Methods Research* 6 (2011): 80–88.
- Freeman, Kathlee. 2017. "ICT Use by Smallholder Farmers in Rural Mozambique: A Case Study of Two Villages in Central Mozambique." *Journal of Rural Social Sciences* 32 (2): 1–19.
- Kloczko-Gajewska, Anna. 2014. "Can We Treat Thematic Villages As Social Innovations?" *Journal of Central European Green Innovation* 2 (3): 49–59.
- Payne, Malcolm. 2014. *Modern Social Work Theory*. 4th ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pingkan, Wildani, and S Hamzens. 2007. "Strategi Inovasi Sosial Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia Nelayan." *Jurnal Penyuluhan* 3 (1): 1–10.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusion of Innovations. Elements of Diffusion*. doi:citeulike-article-id:126680.
- Rubin, Allen; Babbie, Earl. 2011. *Research Methods for Social Work*. Belmont: Linda Schreiber.
- Sofianto, Arif. 2013. "Peran Kelompok Masyarakat Dalam Penguatan Inovasi Sosial Di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang." *Jurnal Bina Praja* 5: 43–52.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. 1994. "Grounded Theory Methodology: An Overview." In *Handbook of Qualitative Research*, 273–85. doi:10.1007/BF00988593.
- Tempo.co. 2017. "Angka Kemiskinan Di Desa Menurun - Nasional Tempo.Co." *Temp.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/896689/angka-kemiskinan-di-desa-menurun>.
- Zastrow, Charles. 2017. *Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering People*. Twelfth. Boston: Cengage Learning.